



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Jend. Achmad Yani No. 239 Bandung

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
KOTA BANDUNG

NOMOR : 800/2378-Disdik

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDUNG
KOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
 5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Bandung.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 09 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG

Drs. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196406291985031006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung

Nomor : 800/2378-Disdik

Tanggal : 09 Oktober 2019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN / KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa lama kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.	Angka ini diperoleh dengan cara membagi banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia a pada tahun t dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia a pada tahun t.	Dinas Pendidikan	Jumlah Siswa SD Jumlah Siswa SMP Jumlah Siswa SMA
.		Angka Kelulusan	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmanatingkat kelulusan siswa.	Jumlah lulusan pada jenjang pendidikan tertentu per jumlah siswa tingkat tertinggi tahun sebelumnya pada tingkat pendidikan tertentu X 100	Dinas Pendidikan	Angka Kelulusan SD Angka Kelulusan SMP Angka Kelulusan Paket A Angka Kelulusan Paket B Angka Kelulusan Paket C
.		Rata-rata Nilai Hasil Ujian SD	Nilai	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmana tingkat kualitas pendidikan.	Nilai Ujian SD	Dinas Pendidikan	Hasil Rata - rata nilai Ujian SD
.		Rata-rata Nilai Hasil Ujian SMP	Nilai	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmana tingkat kualitas pendidikan.	Nilai Ujian SMP	Dinas Pendidikan	Hasil Rata - rata nilai Ujian SMP
.		Peningkatan Infrastruktur Pendidikan	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmana kualitas sarana prasarana	Jumlah Sarana prasarana pendidikan yang dibangun dibagi	Dinas Pendidikan	Sarana prasarana PAUD

				pendidikan.	Jumlah sarana prasarana pendidikan yang dibutuhkan X 100		Sarana Prasarana SD Sarana Prasarana SMP
.		Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kualitas Proses Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah.	Jumlah Sekolah yang tingkat kelulusannya 100% dibagi Jumlah Sekolah dikali 100%	Dinas Pendidikan	Proses Pembajaran PAUD Proses Pembelajaran SD Proses Pembelajaran SMP
.		Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmana tingkatkualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.	Jumlah guru yang disertifikasi dibagi Jumlah guru dikali 100%	Dinas Pendidikan	Jumlah Guru PAUD yang disertifikasi Jumlah Guru SD yang disertifikasi Jumlah Guru SMP yang disertifikasi
.		Peningkatan Mutu akuntabilitas Pengelolaan Pendidikan	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauhmana tingkattransparansi dan akuntabilitas pengelolaan sekolah.	Jumlah Sekolah yang telah menerapkan prinsip-prinsip MBS dibagi Jumlah sekolah dikali 100	Dinas Pendidikan	Pembelajaran inovatif Partisipasi masyarakat transparansi dan akuntabilitas
.		Persentase masyarakat miskin yang mendapat bantuan pendidikan	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa banyakmasyarakat miskin yang mendapat bantuan pendidikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan pendidikan dibagi Jumlah masyarakat miskin yang bersekolah X 100	Dinas Pendidikan	Masyarakat Miskin yang bersekolah
.		Persentase siswa miskin SD yang difasilitasi pendidikannya	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa banyakSiswamiskin SD yang difasilitasi pendidikannya.	Jumlah Siswa miskin SDyang difasilitasi pendidikannya dibagi Jumlah Siswa Miskin SD X 100	Dinas Pendidikan	Siswa Miskin SD
.		Persentase siswa miskin SMP yang difasilitasi pendidikannya	%	Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa banyakSiswamiskin SMP yangdifasilitasi pendidikannya.	Jumlah Siswa miskin SMPyang difasilitasi pendidikannya dibagi Jumlah Siswa Miskin SMP X 100	Dinas Pendidikan	Siswa Miskin SMP
.		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	poin	Indikator ini dipilih untuk mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.	Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan Instansi Pemerintah	Dinas Pendidikan	Pelayanan Bidang Pendidikan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BANDUNG**

Drs. H. HIKMAT GINANJAR, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196406291985031006